TUGAS AKHIR

PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN UMKM PADA USAHA WARUNG INDRANA (PPH ORANG PRIBADI) BERDASARKAN PP 23 TAHUN 2018

Oleh

RAMONA NGADI

NIM 16042004

POLITEKNIK NEGERI MANADO

JURUSAN AKUNTANSI

PROGRAM STUDI D III AKUNTANSI PERPAJAKAN

2019

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL i
HALAMAN JUDUL ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN iv
DAFTAR RIWAYAT HIDUP v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR GAMBAR xii
DAFTAR LAMPIRAN xiii

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 3
1.3 Tujuan Penelitian 3
1.4 Manfaat Penelitian 3
1.5 Metode Analisis Data 4
1.6 Deskripsi Umum UMKM 4
a. Nama dan Bentuk Usaha 4
b. Bidang Usaha 5
c. Lokasi dan Telpon Pemilik UMKM 7
d. Biodata Pemilik UMKM 7

BAB 2 DESKRIPSI PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN UMKM PADA USAHA WARUNG INDRANA (PPh Orang Pribadi) BERDASARKAN PP 23 TAHUN 2018

2.1 Landasan Teori 10
A. Pengertian dan Unsur Pajak 10

B. Fungsi Pajak 11
C. Sistem Pemungutan Pajak 12
D. Pajak Penghasilan Orang Pribadi 12
E. Subjek Pajak Orang Pribadi 13
F. Penghasilan yang Dikenai PPh yang Bersifat Final 16
G. Penghasilan yang Dikecualikan Dari Objek PPh 17
H. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 18
I. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 20
J. Kewajiban Wajib Pajak 22
K. Sanksi Perpajakan 23
L. Pencatatan Perpajakan 25
M. Perlawanan Terhadap Pajak 27
N. Pengertian UMKM 27
O. Kriteria UMKM 28
2.2 Praktek Kewajiban Perpajakan UMKM Warung Indrana 30
Data Penjualan UMKM 30
2.3 Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Pajak Penghasilan Warung Indrana 32
A. Perhitungan Pajak UMKM Warung Indrana 32
B. Penyetoran Pajak UMKM Warung Indrana 33
C. Pelaporan Pajak UMKM Warung Indrana 36
D. Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Berdasarkan UU Pajak . 44

BAB 3 PENUTUP
3.1 Kesimpulan 45
3.2 Saran 45

DAFTAR PUSTAKA
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN (bermaterai)
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Kondisi Barang Dagang Warung UMKM

Lampiran 2 : Kondisi Barang Dagang Warung UMKM

Lampiran 3 : Kondisi Barang Dagang Warung UMKM

Lampiran 4 : Kondisi Barang Dagang Warung UMKM

Lampiran 5 : Kondisi Barang Dagang Warung UMKM

Lampiran 6 : Kunjungan Ke Warung untuk Pengambilan Data

Lampiran 7 : Lembar Konsultasi Dosen Penguji

Lampiran 8 : Lembar Koreksi Penguji

Lampiran 9 : Lembar Asistensi Revisi

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara berkembang yang saat ini terus-menerusmelakukan pembangunan maupun pertumbuhan pada perekonomiannya. Pertumbuhan ekonomi tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak ada pembangunan negara. Begitu pun pembangunan, tidak akan terlaksana apabila ekonomi suatu negara tidak berjalan sesuai dengan sistematis. Untuk menjalankan kedua hal tersebut, Pemerintah membutuhkan dana yang bersumber dari pendapatan negara. Di Indonesia pendapatan negara terdiri atas Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Penerimaan Hibah. Berdasarkan APBN 2018, Penerimaan Perpajakan masih menjadi penyumbang terbesar pendapatan negara yakni mencapai 95% dari total pendapatan negara. Dari data tersebut dapat kita simpulkan bahwa saat ini pajak masih menjadi sumber pendapatan negara terbesar. Menyadari hal tersebut Pemerintah mulai melakukan perbaikan dalam sistem perpajakan.

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, pengertian Pajak adalah kontribusi kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak sangat diperlukan karena masih menjadi penyumbang terbesar pendapatan negara. Secara langsung pembayaran pajak merupakan perwujudan kewajiban dan hak setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dan berperan serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.Namun sayangnya, dari 257 juta populasi orang Orang Pribadi yang mendaftarkan dirinya hanya 30,08 Juta, serta dari 699 ribu yang melaporkan SPT yang membayarkan kewajibannya hanya 421 Ribu. Melihat rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan perbaikan pada

sistem perpajakan dengan cara, menyediakan aplikasi online e-Billing dan e-Filling, memperbanyak melakukan sosialisasi, pelaksanaan amnesti pajak, peningkatan kualitas teknologi dan SDM, meningkatkan mutu pendataan, ketegasan dalam penegakan hukum perpajakan serta peningkatan mutu pemeriksaan dan penagihan. Usaha dari pemerintah membuahkan hasil yang dibuktikan dengan pertumbuhan pada tingkat penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang hingga 31 Maret 2018 telah masuk sebanyak 10,59 juta SPT, atau naik 14% dibandingkan periode yang sama tahun 2017.

UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dalam perekenomian Indonesia menjadi salah satu kelompok usaha yang jumlahnya sangat besar. Peran UMKM di Indonesia dangat mendominasi perekonomian, jumlah unit usaha 98,8% dari total unit usaha, tenaga kerja 96,99% dari total tenaga kerja dan Produk Domestik Bruto 60,3% dari total keseluruhan PDB. Meskipun menjadi kelompok usaha yang dapat diandalkan, peran UMKM dalam aspek perpajakan masih dinilai sangat kurang di akibatkan masih banyak para pelaku usaha yang enggan untuk melaporkan kegiatan usahanya pada pihak perpajakan. Melihat peran UMKM yang sangat penting pemerintah pun telah menerbitkan kebijakan penurunan tarif Pajak penghasilan (PPh) Final menjadi 0,5% bagi pelaku UMKM. Aturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang diberlakukan secara efektif per 1 Juli 2018. Di Kota Manado sektor Usaha Mikro Kecil Menengah menjadi pilihan anak muda kekinian. Pemikiran tentang pekerjaan menjadi pegawai kantoran dan PNS kini mulai ditinggalkan. Mereka lebih memilih menjadi *enterpreneur*yang menurut mereka lebih menjanjikan. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM Sulawesi Utara menunjukkan saat ini terdapat 76.154 pelaku UMKM dan untuk Kota Manado sendiri terdapat 17.122 unit UMKM yang terdata.

Warung Indrana merupakan salah satu pelaku UMKM yang kegiatan usahanya menjual barang-barang kebutuhan rumah tangga. Warung Indrana termasuk dalam kategori usaha dagang yang menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari, bahan bakar minyak seperti Gas LPG 3KG dan 5,5KG serta pulsa dan kuota internet. Selama melakukan kegiatan Praktek Kerja Lapangan, penulis melakukan proses pencatatan terhadap transaksi yang terjadi selama bulan April untuk menghasilkan laporan keuangan yang bisa dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan bagi pemilik usaha. Warung Indrana juga berdasarkan penghasilan yang diperoleh sudah masuk kategori wajib pajak orang pribadi yang seharusnya sudah bisa melaksanakan kewajiban perpajakannya. Namun dikarenakan minimnya pengetahuan tentang pajak dari pemilik usaha, maka hingga saat ini pemilik belum sama sekali melaksanakan kewajibannya meskipun telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Maka berdasarkan uraiai diatas penulis tertarik melakukan penelitian untuk penulisan Tugas Akhir dengan judul: **PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN UMKM PADA USAHA WARUNG INDRANA (PPH ORANG PRIBADI) BERDASARKAN PP 23 TAHUN 2018.**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah berdasarkan uraian diatas adalah Bagaimana pelaksanaan kewajiban perpajakan yang harus dilakukan oleh pemilik usaha Warung Indrana?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kewajiban perpajakan yang seharusnya dilakukan oleh pemilik usaha Warung Indrana.

1.4 Manfaat Peneilitian

1. Bagi Pemilik atau Wajib Pajak

Memberikan informasi tentang pelaksanaan kewajiban perpajakan dan membantu pemilik UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018.

2. Bagi Institusi Jurusan / Program Studi

   Memberi tambahan informasi kepada mahasiswa yang akan menyusun laporan tugas akhir yang memiliki kaitan dengan penulisan ini.

3. Bagi Penulis

   Dapat menambah wawasan/sumber informasi bagi penulis tentang pelaksanaan kewajiban perpajakan yang seharusnya dilakukan oleh UMKM Warung Indrana berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2013.

1.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu menggambarkan, menguraikan, menjelaskan suatu praktek perpajakan berdasarkan peraturan yang ada. Dalam hal ini penulis akan menggambarkan serta menjelaskan mengenai pelaksanaan kewajiban perpajakan pada pemilik usaha Warung Indrana berdasarkan data-data yang dikumpulkan di lapangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

1.6 Deskripsi Umum UMKM

a) Nama dan Bentuk Usaha

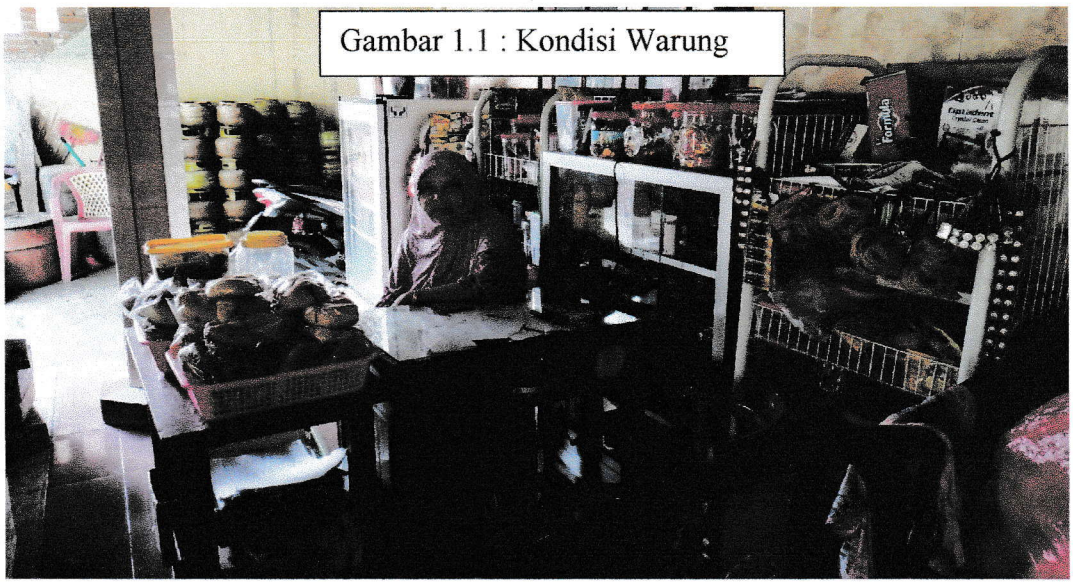
Usaha yang didirikan oleh Ibu Aminah Maku ini diberikan nama Warung Indrana telah berdiri sejak tahun 2002 yang dimulai dengan pangkalan minyak tanah. Pendirian usaha ini berdasarkan keinginan pemilik usaha bersama suaminya yang saat itu belum memiliki penghasilan sejak kepindahannya dari Gorontalo. Pada saat itu disekitar tempat tinggal Ibu Aminah belum ada yang menjual minyak tanah, sedangkan minyak tanah dahulu menjadi salah satu bahan bakar yang paling dicari dan digunakan dalam kegiatan sehari-hari terutama memasak baik bagi ibu rumah tangga, restoran ataupun sebagai bahan bakar untuk

kapal. Kegiatan usaha ini diharapkan mampu mengatasi hal tersebut dan memenuhi kebutuhan warga masyarakat Komo Luar dan sekitarnya. Namun sayangnya, sejak Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengalihkan penggunaan bahan bakar dari minyak tanah ke gas, keberadaan minyak tanah mulai menjadi langkah dan harganya menjadi semakin mahal. Karena tidak ingin usahanya hilang begitu saja, mau tidak mau Ibu Aminah pun memutuskan untuk mengikuti kebijakan beralih menjual Gas LPG 3KG. Beberapa tahun kemudian, Ibu Aminah merasa bahwa pendapatan dari penjualan gas tidak cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian pada pertengahan tahun 2017 untuk menambah pemasukan, Ibu Aminah mulai membuka warung yang menjual barang-barang kebutuhan rumah tangga. Tidak disangka Usaha itu berkembang pesat. Awalnya hanya menjual pulsa dan rokok kemudian lambat laun mulai menambah barang dagangan seperti, beras, sabun, dan kebutuhan rumah tangga lainnya.

b) Bidang Usaha

Usaha tersebut bergerak dalam bidang Dagang dengan menjual barang-barang kelontongan, bahan bakar seperti minyak tanah dan gas LPG 3kg dan 5,5Kg serta berbagai jenis pulsa dan kuota data yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar kelurahan Komo Luar.

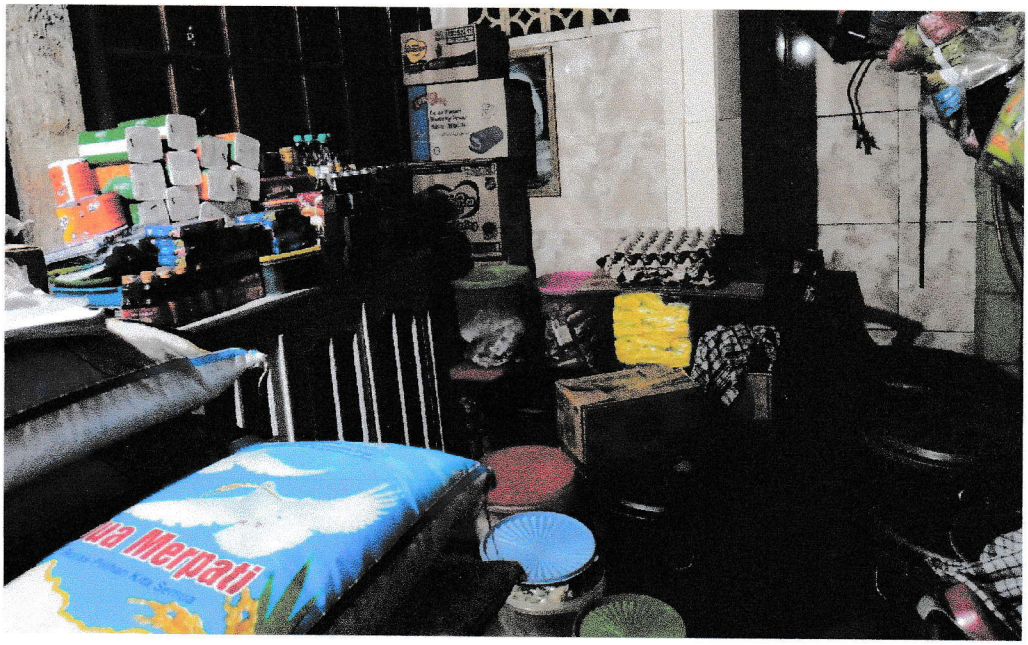
Gambar 1.1 : Kondisi Warung



Gambar 1.2 : Persediaan Gas Elpiji



Gambar 1.3 : Persediaan Sembako



c) Lokasi dan Telpon Pemilik UMKM

Nama UMKM : Warung Indrana

Jenis Usaha : Dagang

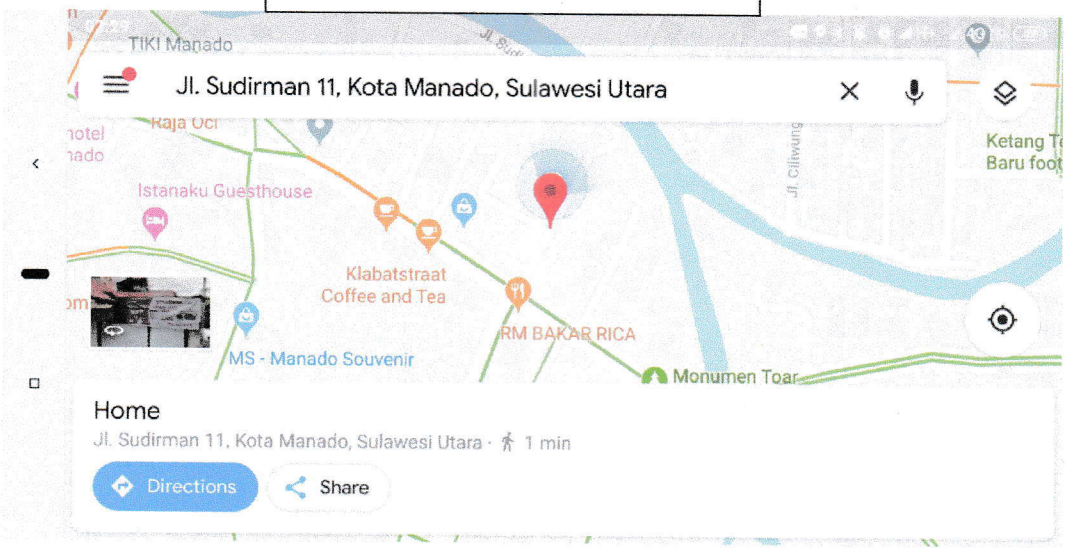
Nama Pemilik UMKM : Aminah Maku

Alamat UMKM : Kec. Wenang, Kel. Komo Luar Lingk III

Kabupaten/Kota : Manado

No. HP/Telepon : 085298148854

Gambar 1.4 : Peta Lokasi UMKM



Gambar 1.5 : Tampak Depan Warung



d) Biodata Pemilik UMKM

Nama	: Aminah Maku
Tempat, Tanggal Lahir	: Manado, 11 Agustus 1964
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: Wirausaha
Alamat	: Kecamatan Wenang, Kelurahan Komo Luar
Kewarganegaraan	: Indonesia
NPWP	: 15.746.839-8.821.000
NIK	: 7171045108640001